

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN MAGELANG

Dwi Fujiyanto¹
Agustina Setiawan²
Arlan Siddha³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

The implementation of the Child Identity Card (Kartu Identitas Anak/KIA) policy represents a strategic step in strengthening Indonesia's population administration system and ensuring children's civil rights protection. This study aims to analyze the implementation of the KIA service policy in Magelang Regency using Merilee S. Grindle's model of policy implementation, which emphasizes two dimensions: content of policy and context of implementation. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil), sub-district officials, and service users, as well as direct observation and document analysis. The findings reveal that the KIA policy has been implemented according to national regulations; however, its effectiveness remains constrained by limited human resources, insufficient facilities, and low public awareness of the policy's importance. The content of policy dimension shows that regulatory clarity and administrative structure are well established, yet gaps persist in socialization and resource distribution. Meanwhile, the context of implementation indicates that bureaucratic coordination and community participation have not been fully optimized. The study concludes that successful KIA policy implementation requires strengthening bureaucratic capacity, expanding digital-based services, and enhancing collaborative networks among institutions. This research contributes to the discourse on public policy implementation and offers practical recommendations for improving public service delivery in population administration.

Keywords: *policy implementation, child identity card, public service, population administration, governance*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keakuratan data kependudukan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelayanan publik yang efektif. Salah satu kebijakan penting dalam bidang ini adalah penerbitan Kartu

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Identitas Anak (KIA), yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA dirancang untuk memberikan identitas hukum kepada anak-anak berusia di bawah 17 tahun, sekaligus menjadi bentuk perlindungan administratif terhadap hak-hak anak. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen pemerintah daerah.

Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan KIA sejak tahun 2017. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang tahun 2024, dari total 430.000 anak usia 0–16 tahun, baru sekitar 290.000 anak (67%) yang telah memiliki KIA. Capaian tersebut masih di bawah target nasional sebesar 80%. Rendahnya capaian ini menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional, baik dari sisi sosialisasi, kesiapan aparatur, maupun dukungan infrastruktur pelayanan publik.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat KIA. Sebagian orang tua menganggap KIA belum penting karena anak-anak belum memiliki kebutuhan administratif seperti perbankan atau pendidikan formal tertentu. Selain itu, masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan blanko, jaringan internet yang tidak stabil di wilayah perdesaan, serta beban kerja petugas yang tinggi akibat keterbatasan jumlah pegawai di Disdukcapil Kabupaten Magelang.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh faktor lingkungan, sumber daya, serta sikap pelaksana kebijakan. Grindle (1980) dalam model *Implementation as a Political and Administrative Process* menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi besar, yaitu *content of policy* (substansi kebijakan) dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

context of implementation (konteks pelaksanaan). Kedua dimensi ini menjadi landasan analisis untuk memahami bagaimana kebijakan KIA diterapkan di tingkat daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Magelang?”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pelayanan KIA dengan menggunakan pendekatan Grindle, sehingga dapat mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan alternatif perbaikan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik pada sektor pelayanan administrasi kependudukan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan cakupan KIA yang efektif dan berkelanjutan.

Kerangka Teori

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model *Implementation as a Process* dari Merilee S. Grindle (1980). Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*).

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dimensi ini menjelaskan sejauh mana substansi kebijakan mampu menjawab kebutuhan target sasaran. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang disediakan. Dalam konteks kebijakan KIA, dimensi ini mencerminkan kejelasan regulasi, kesiapan perangkat pelaksana, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

2. Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*) ngan politik, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor yang termasuk dalam konteks implementasi antara lain kekuasaan dan kepentingan para aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Magelang, konteks ini mencakup koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dukungan teknologi, serta komitmen pemerintah daerah.

Model Grindle relevan digunakan karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial politik tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna di balik tindakan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan program KIA di Kabupaten Magelang. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang, dengan informan utama meliputi pejabat struktural Disdukcapil, pegawai pelaksana pelayanan KIA, aparat kecamatan, serta masyarakat penerima layanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap laporan kinerja Disdukcapil serta data statistik BPS 2023–2024. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldaña (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkannya dengan data dokumen resmi.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kejelasan peraturan, tetapi juga pada kemampuan organisasi pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Magelang, efektivitas implementasi dipengaruhi oleh interaksi antara struktur birokrasi, sumber daya yang tersedia, serta respon masyarakat sebagai penerima kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun regulasi telah diterapkan secara formal, efektivitasnya masih menghadapi tantangan dari aspek teknis, sosial, dan kelembagaan.

Kebijakan KIA secara konseptual dimaksudkan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan dan perlindungan anak. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di daerah. Sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sarana teknologi, serta beban kerja pegawai Disdukcapil menjadi faktor yang menurunkan kinerja pelayanan. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan mendasar, melainkan sekadar kewajiban administratif.

Proses pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Magelang menunjukkan dinamika yang khas. Dukungan pemerintah daerah relatif kuat, ditunjukkan oleh komitmen Kepala Daerah melalui Surat Edaran tentang percepatan penerbitan KIA, namun koordinasi antarinstansi belum optimal. Selain itu, pelibatan sekolah dan lembaga pendidikan dalam pendataan anak sudah berjalan, tetapi kolaborasi dengan puskesmas, RT/RW, dan lembaga masyarakat masih sporadis. Situasi ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap dua aspek utama dalam teori Grindle (1980): isi kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksanaan (context of implementation).

Analisis dalam bagian ini membedah bagaimana dua dimensi tersebut memengaruhi kinerja implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Magelang. Setiap

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

dimensi dijelaskan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan, dengan penekanan pada peran pelaksana, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

1) Dimensi *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Dimensi pertama dalam model Grindle menekankan pada bagaimana isi kebijakan dirancang dan diterjemahkan ke dalam tindakan. *Content of policy* mencakup kejelasan tujuan, kepentingan pihak yang terlibat, sumber daya, serta manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks kebijakan KIA di Kabupaten Magelang, dimensi ini menjelaskan sejauh mana kebijakan tersebut memiliki arah, sasaran, dan substansi yang mampu menjawab kebutuhan administrasi kependudukan anak di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi kebijakan KIA telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaan di daerah, masih terjadi penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Disdukcapil, sebagian perangkat pelaksana di tingkat kecamatan belum sepenuhnya memahami detail teknis kebijakan, terutama terkait prosedur pendaftaran dan batasan usia penerbitan KIA. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan informasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, manfaat kebijakan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. KIA menjadi dokumen penting bagi pendaftaran siswa baru serta keperluan administratif anak di fasilitas kesehatan. Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat di wilayah pedesaan belum memahami urgensi kepemilikan KIA. Sebagian besar orang tua menganggap KIA belum diperlukan sebelum anak bersekolah. Rendahnya tingkat kesadaran ini menyebabkan pencapaian

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

target nasional belum optimal dan baru mencapai 67% dari total anak usia 0–16 tahun di Kabupaten Magelang.

Dari sisi sumber daya, ketersediaan pegawai dan fasilitas pelayanan masih menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan data Disdukcapil (2024), hanya terdapat 12 petugas pelayanan untuk 21 kecamatan, dengan fasilitas jaringan internet di beberapa kecamatan masih tidak stabil. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan antrean panjang, terutama menjelang tahun ajaran baru. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa substansi kebijakan yang baik belum didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, *content of policy* kebijakan KIA di Kabupaten Magelang sudah memiliki kejelasan tujuan dan regulasi yang kuat, namun efektivitasnya masih bergantung pada penguatan kapasitas pelaksana dan sosialisasi kebijakan yang lebih luas. Diperlukan strategi inovatif, seperti digitalisasi pelayanan dan integrasi data antarinstansi, agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

2) Dimensi *Context of Implementation* (Konteks Pelaksanaan)

Dimensi kedua teori Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks sosial, politik, dan administratif yang melingkupinya. *Context of implementation* berfokus pada relasi antaraktor, dukungan masyarakat, serta lingkungan kelembagaan yang berpengaruh terhadap jalannya kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Magelang, dimensi ini menjadi kunci dalam memahami mengapa pelaksanaan KIA berjalan baik di sebagian wilayah, namun masih lambat di wilayah lain.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik dan komitmen dari pimpinan daerah cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menjadikan penerbitan KIA sebagai indikator kinerja utama bidang administrasi kependudukan. Akan tetapi, koordinasi antarinstansi pelaksana belum berjalan efektif. Misalnya, beberapa sekolah dan puskesmas belum terintegrasi secara penuh dalam proses pendaftaran kolektif KIA, sehingga proses pendataan anak masih manual dan memakan waktu.

Konteks sosial juga memainkan peran penting. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga mulai memahami pentingnya KIA setelah dilakukan sosialisasi langsung oleh petugas Disdukcapil. Namun, sosialisasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang cenderung administratif setelah ada keperluan tertentu turut menghambat partisipasi aktif dalam program ini.

Konteks kelembagaan memperlihatkan bahwa koordinasi antara Disdukcapil, kecamatan, dan desa masih bersifat vertikal dan birokratis. Banyak aparatur di tingkat desa yang belum memiliki kapasitas teknis dalam membantu masyarakat mendaftar KIA secara online. Hal ini mengakibatkan beban pelayanan terpusat di kantor Disdukcapil kabupaten. Di sisi lain, dukungan infrastruktur digital dan jaringan data kependudukan masih terbatas, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Pakis dan Grabag.

Secara umum, *context of implementation* kebijakan KIA di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat, namun belum diimbangi dengan koordinasi kelembagaan dan partisipasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perluasan literasi administrasi publik masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Berdasarkan uraian kedua dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten Magelang telah menunjukkan progres yang cukup signifikan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi kebijakan dan adaptasi terhadap konteks lokal. Substansi kebijakan sudah kuat, namun hambatan teknis dan sosial memperlambat pencapaian target nasional.

Implementasi kebijakan KIA menegaskan bahwa keberhasilan program publik tidak hanya bergantung pada kinerja aparatur, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan kolaborasi antar lembaga. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memposisikan masyarakat sebagai mitra kebijakan, bukan sekadar penerima layanan.

Oleh karena itu, strategi implementasi yang efektif harus menempatkan dimensi *content of policy* dan *context of implementation* secara seimbang. Dengan memperkuat substansi kebijakan dan membangun konteks sosial yang inklusif, diharapkan pelayanan KIA dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh anak di Kabupaten Magelang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pelayanan **Kartu Identitas Anak (KIA)** di Kabupaten Magelang secara umum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya memperkuat sistem administrasi kependudukan daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala yang bersumber dari aspek substansi kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle (1980), dua dimensi utama yaitu, *content of policy* dan *context of implementation* dimana dimensi tersebut memperlihatkan dinamika yang berbeda namun saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan kebijakan.

Pada dimensi *content of policy*, substansi kebijakan KIA telah memiliki kejelasan tujuan, dasar hukum, dan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Regulasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

yang jelas dan dukungan administratif dari pemerintah pusat menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaannya di daerah. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan kebijakan di tingkat operasional, terutama karena keterbatasan jumlah pegawai, sarana teknologi yang belum memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap urgensi kepemilikan KIA. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil optimal sesuai target nasional.

Sementara itu, pada dimensi *context of implementation*, keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Magelang sangat bergantung pada dukungan politik, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen tinggi dengan menjadikan KIA sebagai salah satu prioritas dalam bidang administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam membangun sistem kolaborasi yang efektif antara Disdukcapil, kecamatan, desa, dan lembaga masyarakat. Rendahnya partisipasi publik juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan belum adanya sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan KIA tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan konteks pelaksanaan dengan kondisi sosial, teknologi, dan budaya masyarakat setempat. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, komunikasi kebijakan, dan partisipasi publik, program KIA dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen perlindungan identitas anak dan dasar pembangunan data kependudukan nasional yang berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pelayanan KIA:

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pemahaman substansi kebijakan, penggunaan sistem digital pelayanan administrasi kependudukan, serta keterampilan komunikasi publik. Kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi pelayanan digital berbasis integrasi data kependudukan agar proses pendaftaran, pencetakan, dan distribusi KIA dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Implementasi sistem daring juga dapat mengurangi antrean dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik, terutama di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat pelayanan.

Ketiga, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi publik yang lebih intensif dan partisipatif. Pemerintah desa, sekolah, dan lembaga kesehatan dapat dijadikan mitra strategis dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat KIA, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan angka kepemilikan KIA dapat mencapai target nasional.

Keempat, dibutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi dan sinergi lintas sektor, terutama antara Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perangkat desa. Koordinasi yang kuat akan mempermudah proses pendataan anak dan mempercepat layanan pendaftaran KIA secara kolektif.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten Magelang hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara kebijakan yang jelas (content of policy) dan konteks pelaksanaan yang adaptif (context of implementation). Dengan memperkuat kedua dimensi ini secara simultan, implementasi kebijakan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta inklusif di tingkat daerah.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

REFERENSI

- Aini, N., & Prabowo, T. (2021). *Evaluasi kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 123–134. <https://doi.org/10.14710/jian.v9i2.2021>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kependudukan Indonesia 2024: Dinamika demografi dan administrasi kependudukan nasional*. Jakarta: BPS RI. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Budiani, N. (2007). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 8(1), 45–56.
- Disdukcapil Kabupaten Magelang. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Magelang: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Handayani, R., & Puspitasari, D. (2020). *Public service innovation and digital governance in population administration services*. *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 32–45. <https://doi.org/10.31002/jbcp.v12i1.2020>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kurniasih, F., & Rahmawati, D. (2022). *Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang: Perspektif teori Grindle*. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 5(3), 101–115. <https://doi.org/10.31293/japk.v5i3.2022>
- Mulyadi, D., & Nurhadi, A. (2023). *Digital transformation in local government services: A case of civil registration reform in Indonesia*. *Public Administration Journal*, 4(2), 67–81. <https://doi.org/10.24198/paj.v4i2.2023>
- Rahmawati, E., & Kadir, F. (2021). *Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam pelayanan publik berbasis digital*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 89–102.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

Suharyanto, A., & Iskandar, T. (2022). *Governance capacity and citizen trust in the implementation of population policies in Indonesia*. *Jurnal Tata Pemerintahan Daerah*, 7(1), 59–75. <https://doi.org/10.21009/jtpd.2022.07.01>

Susanti, N., & Hidayat, S. (2023). *Strengthening collaborative governance in population administration services*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 8(2), 91–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1032984>

World Bank. (2024). *Indonesia: Strengthening local governance and public service delivery*. Washington, D.C.: The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance>